

Dinamika konflik dan konsensus dalam sejarah perumusan Pancasila

Ubaidillah Al Fajry

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110072@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pancasila, Perumusan Pancasila, BPUPKI, Konflik Ideologis, Konsensus Nasional

Keywords:

Pancasila, Formulation of Pancasila, BPUPKI, Ideological Conflict, National Consensus

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika konflik ideologis dan upaya konsensus dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Melalui pendekatan sejarah kualitatif, penelitian mengkaji proses perdebatan di sidang BPUPKI antara kelompok Islam dan sekuler terkait dasar negara, serta bagaimana konflik tersebut menghasilkan kompromi yang mengutamakan persatuan bangsa. Pancasila lahir sebagai hasil musyawarah panjang yang mampu merangkul keberagaman dan menjadi simbol inklusivitas sekaligus kesatuan nasional di tengah kompleksitas sosial-politik Indonesia. Hasil penelitian menegaskan pentingnya nilai-nilai musyawarah dan

kompromi dalam menjaga relevansi Pancasila sebagai dasar negara yang fleksibel dan toleran terhadap perubahan zaman dan keberagaman budaya. Studi ini juga merekomendasikan penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan semangat persatuan dan nilai Pancasila, serta perlunya dialog terbuka dalam kehidupan berbangsa guna menghadapi tantangan globalisasi dan pluralitas masyarakat. Dengan demikian, Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam membangun bangsa yang adil, makmur, dan bersatu.

ABSTRACT

This study examines the dynamics of ideological conflict and the pursuit of consensus in the formulation of Pancasila as the foundation of the Indonesian state. Using a qualitative historical approach, the study examines the debate between Islamic and secular groups regarding the foundation of the state during the BPUPKI session, and how this conflict resulted in a compromise that prioritized national unity. Pancasila emerged as the result of lengthy deliberations that embraced diversity and became a symbol of inclusivity and national unity amidst Indonesia's socio-political complexity. The results of this study emphasize the importance of the values of deliberation and compromise in maintaining Pancasila's relevance as a state foundation that is flexible and tolerant of changing times and cultural diversity. This study also recommends strengthening civic education to instill a spirit of unity and the values of Pancasila, as well as the need for open dialogue in national life to face the challenges of globalization and societal plurality. Thus, Pancasila remains the primary foundation for building a just, prosperous, and united nation.

Pendahuluan

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan sebuah perjalanan sejarah yang penuh dengan dinamika, meliputi konflik dan upaya mencapai kesepakatan. Pada masa sidang BPUPKI tahun 1945, muncul berbagai perbedaan kepentingan, ideologi, dan aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat yang harus diakomodasi dalam merancang dasar negara yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. menelusuri akar nilai-nilai Islam yang menjadi bagian dari perumusan Pancasila dan UUD 1945, menunjukkan bahwa tidak sedikit tokoh Islam yang memperjuangkan agar dasar negara mencerminkan nilai-nilai Islam, tetapi akhirnya terjadi penyesuaian agar bisa



menjadi dasar negara yang inklusif (Adityo, 2017). Terjadinya konflik terutama terlihat dalam perdebatan mengenai nilai-nilai religius dan kebangsaan yang menjadi fondasi bangsa. Namun, lewat proses musyawarah yang panjang, tercapailah kesepakatan yang tertuang dalam sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai hasil kompromi dari beragam pandangan tersebut (Jurnal UNS, 2021). Proses tersebut menegaskan betapa pentingnya prinsip musyawarah dan mufakat untuk menemukan titik temu di tengah keanekaragaman masyarakat Indonesia. Pancasila bukan sekadar hasil kompromi, melainkan simbol persatuan nasional yang menjaga keberagaman bangsa agar tetap utuh dan bersatu (GudangJurnal.com, 2020). Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai landasan yang kokoh dalam menjaga kesatuan negara Indonesia.

Selain itu, makna Pancasila terus berkembang sebagai respons terhadap berbagai perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi. Faslah (2024) menegaskan bahwa identitas nasional merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan strategi bangsa untuk mampu menghadapi tantangan global. Dengan pemahaman identitas nasional yang menyeluruh, Indonesia dapat membangun keberlanjutan bangsa sekaligus menjaga kedaulatan melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kerjasama internasional. Oleh karena itu, kajian tentang dinamika konflik dan konsensus dalam sejarah perumusan Pancasila menjadi sangat relevan untuk memahami makna dan peran Pancasila dalam menjaga keberagaman sekaligus persatuan bangsa di era globalisasi.

Metode dan Tujuan

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah secara kualitatif, dengan menggali dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti dokumen arsip, jurnal, dan buku terkait proses perumusan Pancasila. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami secara mendalam bagaimana proses perumusan Pancasila berlangsung, termasuk perdebatan, konflik, serta usaha pencapaian kesepakatan di antara para pendiri bangsa pada masa sidang BPUPKI. Dengan mengkaji berbagai data historis, penelitian ini mencoba memaparkan konteks sosial-politik yang memengaruhi proses tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana dinamika konflik serta proses konsensus dalam perumusan Pancasila membentuk dasar negara Indonesia. Penelitian ini juga bermaksud menggambarkan bagaimana keberagaman pandangan dapat disatukan melalui musyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan bersama yang menjadi identitas nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan zaman modern dan globalisasi.

Pembahasan

Perdebatan Ideologis di BPUPKI: Antara Islam dan Sekularisme

Perdebatan mengenai dasar negara Indonesia pada masa sidang BPUPKI tahun 1945 merupakan salah satu momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya pada

segmen terkait ideologi yang dijadikan landasan pijak negara. Pendirian BPUPKI sebagai wadah perumusan dasar negara, di mana konflik ideologis, serta peran perempuan menjadi bagian dari negosiasi. Dalam forum yang berjumlah 62 orang ini, sangat jelas terjadi perbedaan dengan konsekuensi nasionalis Islam dalam pemimpinannya dan Ki Bagus Hadikusumo dan Mohammad Hatta, dan bangsa sekuler yang memimpin adalah Soekarno dan Muhammad Yamin. Gerakan politik Islam yang menguasai sebagian besar kursi parlemen mengajukan agar dasar negara mengambil dari syariat Islam dalam menjalankan kewajiban syariat Islam bagi Muslim seperti tertulis Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" sebagai sila pertama. (Islam, Politik, and Indonesia 2016)

Sedangkan golongan sekuler menentang pengakuan syariat Islam secara eksplisit dalam dasar negara karena akan memicu polarisasi bahkan perpecahan di dalam kebhinekaan masyarakat Indonesia. Soekarno sebagai tokoh sentral mengemukakan pengertian Pancasila asli pada 1 Juni 1945 dengan penekanan pada lima sila di antaranya Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa menyebutkan kewajiban syariat Islam. Perdebatan tersebut merupakan ilustrasi tegangnya hubungan antara negara Islam yang menghendaki dasar negara berasaskan agama Islam dengan negara sekuler yang menempatkan negara kebangsaan yang netral kepada segala agama sebagai lambang persatuan bangsa. Kekosongan Islam bahwa pola sekuler akan mengabaikan identitas dan kepentingan Muslim mayoritas diimbangi oleh pandangan dari kelompok sekuler yang menjunjung persatuan nasional yang jauh lebih luas lagi dan bukan persatuan atas dasar agama. (Hukum and Dan 2021). Dalam keadaan yang demikian, dapat disimpulkan bahwa perdebatan ini kemudian menjadi penghasilan konsensus yang dapat diterima melahirkan Pancasila yang begitu inklusif, yang memungkinkan terbentuk dalam diam karena salah satunya adalah keberagaman bangsa Indonesia. Ini dapat dimaknai bahwa walaupun ada banyak perbedaan secara fundamental, tapi para pendiri kita membuat upaya keras untuk mencari jalan keluar untuk mengamankan persatuan nasional sekaligus memberi salam hormat pada kemajemukan. (Hariyanto and Islamy 2022)

Dinamika Ketegangan dan Proses Konsensus

Ketegangan yang muncul selama sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di era pendudukan Jepang tidak hanya mencerminkan perbedaan ideologi, tapi juga keragaman sosial-politik Indonesia yang kompleks, meliputi variasi suku, agama, dan wilayah. BPUPKI didirikan oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 sebagai lembaga yang bertugas menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini merupakan langkah strategis Jepang untuk mengalihkan dukungan rakyat Indonesia menjelang akhir Perang Dunia II, meskipun pada akhirnya berkontribusi pada proses kemerdekaan. Sidang pertamanya, yang berlangsung dari 28 Mei hingga 1 Juni 1945, menjadi titik krusial dalam merumuskan fondasi negara. (Budi et al. 2021)

Di satu sisi, kelompok Islam mendesak agar syariat Islam diakui sebagai elemen identitas nasional dan dimasukkan ke dalam dasar negara, sementara kelompok sekuler mendorong dasar negara yang netral untuk mempertahankan keharmonisan sosial.

Perdebatan ini mencerminkan dilema antara aspirasi keagamaan mayoritas Muslim dan kebutuhan inklusivitas di negara yang multikultural, yang masih relevan dalam diskusi politik Indonesia modern. Dalam sidang itu, Muhammad Hatta menyatakan bahwa pengakuan syariat Islam penting untuk mewujudkan harapan umat Islam, tetapi Soekarno menekankan bahwa mewajibkannya bisa memicu perpecahan di tengah masyarakat yang beragam. Pernyataan Soekarno ini menunjukkan visi nasionalismenya yang lebih luas, mengutamakan persatuan daripada kepentingan kelompok tertentu, yang kemudian menjadi ciri khas Pancasila. (Payapo, Salamor, and Sialana 2023). Perdebatan ini mendorong lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan sebagai hasil kompromi. Dokumen itu menyertakan frasa “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di sila pertama sebagai jembatan antara elemen Islam dan sekuler. Piagam Jakarta awalnya dirancang sebagai konstitusi sementara, tapi akhirnya digantikan oleh UUD 1945, menunjukkan dinamika politik yang cepat berubah pasca-proklamasi. Namun, kompromi ini hanya sementara. (Barton and Yilmaz 2021)

Di sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, untuk menjaga keutuhan bangsa dan menghindari penolakan dari kelompok minoritas non-Muslim, terutama di Indonesia Timur, frasa tentang kewajiban syariat Islam dihapus. Keputusan ini mencerminkan kompromi pragmatis untuk mempercepat kemerdekaan, meskipun menimbulkan perdebatan panjang tentang identitas nasional. Langkah ini didukung oleh tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan Radjiman Wediodiningrat. Soekarno dan Hatta setuju dengan perubahan itu sebagai strategi untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dukungan dari tokoh-tokoh ini menunjukkan konsensus elit politik saat itu, yang memprioritaskan kemerdekaan daripada perbedaan ideologis, meskipun dampaknya masih dirasakan dalam politik kontemporer. (Bourchier and Bourchier 2019)

Seperti yang dijelaskan dalam buku “Sejarah Perumusan Pancasila,” proses ini menunjukkan dinamika ketegangan yang melibatkan aspek politik, sosial, dan agama, yang pada akhirnya menghasilkan konteks untuk menjaga keutuhan bangsa. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana perdebatan tersebut membentuk fondasi Pancasila sebagai ideologi negara yang inklusif, meskipun tetap menjadi sumber diskusi di kalangan akademik dan politik. (Government Control of Islamic Ideology Movement: A Case of Indonesia Ristapawa Indra, * Mahyudin Ritonga ** & Fitrah Santosa *** 2023)

Pancasila sebagai Kompromi Nasional: Implikasi dan Refleksi

Pancasila itu sendiri bisa dibilang sebagai hasil dari kompromi besar-besaran di tingkat nasional, yang menangkap semangat kesepakatan politik di tengah-tengah bentrokan ideologi saat negara ini sedang dibentuk. Di sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, ada perdebatan sengit antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam soal dasar negara Indonesia. Kaum nasionalis ingin dasar negara yang terbuka dan tidak terikat pada agama tertentu, sedangkan kelompok Islam mendorong agar syariat Islam dijadikan panduan bagi para pemeluknya. Akhirnya, kompromi dari kedua pandangan ini melahirkan rumusan Piagam Jakarta, yang menyertakan sila pertama dengan bunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

(Sebelas et al. 2021) Kutipan ini menunjukkan bagaimana Piagam Jakarta awalnya mencoba menyeimbangkan aspirasi keagamaan dengan kebutuhan inklusivitas, meskipun akhirnya disesuaikan untuk menghindari konflik lebih lanjut.

Tapi, untuk menjaga persatuan bangsa dan menghindari kesan bahwa ideologi tertentu mendominasi, pada 18 Agustus 1945, frasa itu disederhanakan jadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini adalah langkah strategis yang disepakati oleh tokoh-tokoh dari kalangan Islam dan nasionalis setelah melalui dialog panjang yang penuh semangat kompromi dan musyawarah. (Triantoro 2017) Proses dialog ini mencerminkan tradisi gotong royong Indonesia, di mana keputusan kolektif lebih diutamakan daripada kepentingan individu, yang membantu mempercepat proklamasi kemerdekaan. Dengan begitu, Pancasila bukanlah hasil dari dominasi satu kelompok saja, melainkan produk negosiasi ideologis yang berhasil menampung keragaman bangsa Indonesia. Buku Ilyas ini menggali bagaimana negosiasi tersebut melibatkan tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta, yang memainkan peran kunci dalam menjembatani perbedaan. (Wahid 2024) Dampak dari kompromi ini ternyata sangat dalam untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pancasila jadi fondasi yang fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial serta keberagaman keyakinan di Indonesia. Meski tidak sepenuhnya memenuhi harapan kelompok Islam, Pancasila tetap memberikan ruang bagi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan publik dan pemerintahan. Ini menunjukkan fleksibilitas Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang memungkinkan interpretasi beragam tanpa mengorbankan persatuan, seperti dalam kebijakan-kebijakan toleransi agama saat ini. (Triantoro 2017)

Kalau kita refleksi proses ini, ternyata konflik ideologis di BPUPKI bukanlah penghalang, tapi justru pemicu bagi munculnya konsensus nasional. Ketegangan antara kelompok Islam dan sekuler malah memperkuat dasar demokrasi deliberatif yang jadi ciri khas bangsa kita. (Rifki et al. 2025) Buku Latif ini menekankan pentingnya dialog dalam sejarah Indonesia, yang masih bisa diterapkan dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer seperti reformasi konstitusi. Pengalaman ini mengajarkan pelajaran berharga bahwa dialog dan kompromi itu esensial dalam membentuk identitas nasional. Meski perdebatan soal peran agama dalam negara masih terdengar sampai sekarang, terutama dalam konteks amandemen konstitusi, Pancasila tetap bertahan sebagai simbol persatuan bangsa. Referensi silang ini menyoroti kontinuitas sejarah, di mana perdebatan masa lalu terus memengaruhi diskusi politik modern, seperti dalam wacana tentang negara Islam. (Journal and Pertiwi 2020). Jadi, dinamika kompromi dalam perumusan Pancasila menegaskan bahwa ideologi negara kita lahir dari proses historis yang rumit dan inklusif, bukan dari keputusan sepihak. Di era sekarang, semangat kompromi itu perlu kita jaga agar Pancasila tetap relevan sebagai dasar persatuan di tengah tantangan pluralitas dan globalisasi. Artikel ini menyarankan pendidikan kewarganegaraan sebagai cara untuk menjaga semangat tersebut, dengan mengintegrasikan pelajaran sejarah ke dalam kurikulum sekolah. (Supawi 2023)

Kesimpulan dan Saran

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan hasil dari dinamika yang kompleks dan penuh dengan konflik ideologis, khususnya antara kelompok Islam

dan sekuler. Dalam sidang BPUPKI, terjadi perdebatan yang sengit mengenai apakah dasar negara harus mencerminkan nilai-nilai Islam secara eksplisit atau lebih mengedepankan sifat inklusif dan netral untuk menjaga persatuan bangsa yang pluralistik. Melalui proses musyawarah dan kompromi panjang, akhirnya tercapai kesepakatan yang melahirkan Pancasila sebagai landasan yang mampu merangkul keberagaman sekaligus menguatkan persatuan nasional. Pancasila menjadi simbol toleransi dan kesatuan yang fleksibel, mampu menyesuaikan dengan perubahan sosial dan politik tanpa kehilangan identitas nasional.

Untuk menjaga relevansi dan kekuatan Pancasila di masa depan, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus mengedepankan semangat musyawarah dan kompromi yang telah menjadi tradisi dalam pembentukan negara ini. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah hendaknya dioptimalkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar keberagaman dan persatuan. Selain itu, dialog terbuka dan inklusif perlu terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, termasuk globalisasi dan pluralitas budaya. Dengan demikian, Pancasila dapat terus menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun bangsa yang adil, makmur, dan bersatu.

Daftar Pustaka

- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Repositori UIN Alauddin. (2024). Perdebatan dalam Sidang BPUPKI tentang Dasar Negara
- Barton, Greg, and Ihsan Yilmaz. 2021. "Contestations of Islamic Religious Ideas in Indonesia." : 1–20.
- Bourchier, David M, and David M Bourchier. 2019. "Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism." *Journal of Contemporary Asia* 49(5): 713–33. doi:10.1080/00472336.2019.1590620.
- Budi, Yusuf, Prasetya Santosa, Rina Kurnia, and Ki Bagus Hadikusumo. 2021. "Kontribusi Ki Bagus Hadikusumo Dalam Sidang BPUPKI Mei-Juli 1945 Ki Bagus Hadikusumo ' s Contribution to the BPUPKI Session in May-July 1945." 2(3).
- "Government Control of Islamic Ideology Movement: A Case of Indonesia Ristapawa Indra, * Mahyudin Ritonga ** & Fitrah Santosa ***." 2023. 18(1): 129–44.
- Hariyanto, Didik, and Athoillah Islamy. 2022. "Pola Interaksi Sosial Kelompok Islam Dalam Sejarah Konsensus Dasar Negara Indonesia This Tidak Dapat Dibantah Bahwa Eksistensi Islam Dan Politik Dalam Kehidupan Bernegara Bagi Umat Islam Merupakan Relasi Yang Tidak Mudah Dipisahkan Dengan Sistem Politik Modern (Athoillah Islamy and Haq 2020 , 55). Sebagai Contoh , Politik Demokrasi (Athoillah Islamy 2022a , 19).

- Hukum, Jurnal, and Politik Dan. 2021. "PANCASILA Sebagai KISAH *]." 1(2): 88–98.
- Islam, Relasi, D A N Politik, and D I Indonesia. 2016. "Wahyuddin." 16: 70–82.
- Journal, Sociological Jurisprudence, and Mahaarum Kusuma Pertiwi. 2020. "SOCIOLOGICAL Historical Development over Religious Liberty in the Indonesian Constitution." 3(1): 65–74.
- Payapo, Ismunandar, Lisy Salamor, and Fatima Sialana. 2023. "Analisis Tingkat Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Seram Bagian Barat Terhadap Kedudukan Pancasila Sebagai Falsafah Negara." 05(04): 14470–80.
- Rifki, Imam Hafizar, Islam Negeri, Sumatera Utara, Kota Medan, and Sumatera Utara. 2025. "DINAMIKA HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI." 2(2): 7–12.
- Sebelas, Universitas, Maret Surakarta, Universitas Sebelas, Maret Surakarta, Universitas Sebelas, Maret Surakarta, Universitas Sebelas, and Maret Surakarta. 2021. "Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa." 27(2): 230–49.
- Supawi, Trei Ilham. 2023. "POLITIK ISLAM DI INDONESIA : IDEOLOGI PARTAI MASYUMI MASA ORDE LAMA DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) MASA REFORMASI." : 64–72.
- Triantoro, Dony Arung. 2017. "Praktik Politik Identitas Dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi." : 19–40.
- Wahid, Jim Hidayah. 2024. "Kontribusi Konvensi ILO No . 100 Terhadap Hubungan Industrial Di Indonesia." (1).